



Article

ADOPSI PEMBAYARAN DIGITAL DI PEDESAAN: PERUBAHAN PRILAKU FINANSIAL DAN TANTANGAN INKLUSI KEUANGAN

Heru Irawan^{1*}, Bram Aprizon P Senima², Mukti Sasongko³, Maria Septijantini Alie⁴

¹ Universitas Mitra Indonesia, Bandar Lampung, Indonesia;
email: heruirawan88.hi@gmail.com

² Universitas Mitra Indonesia, Bandar Lampung, Indonesia;
email: aprizonbram@gmail.com

³ Universitas Mitra Indonesia, Bandar Lampung, Indonesia;
email: muktisasongko@gmail.com

⁴ Universitas Mitra Indonesia, Bandar Lampung, Indonesia;
email: maria.alie@umitra.ac.id

* Corresponding email: heruirawan88.hi@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the adoption of digital payment systems in rural communities and its impact on financial behavior, using Pekalongan Village, East Lampung Regency, as a case study. A mixed-methods approach was employed to provide a comprehensive analysis. Quantitative data from a survey were analyzed using Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS), while qualitative data from in-depth interviews were used to enrich the empirical findings. The results reveal that digital payment adoption in rural areas has not yet reached the level of a daily habit. Perceived ease of use, usefulness, trust, digital literacy, and infrastructure access significantly and positively influence adoption. Furthermore, the integration of digital payments contributes to improved financial behavior, specifically in transaction record-keeping, expenditure control, and saving practices. These findings underscore the critical role of digital infrastructure and literacy as prerequisites for sustainable financial inclusion. Theoretically, this research bridges the gap between technology adoption and behavioral finance in a rural context, providing strategic implications for policymakers to foster a more inclusive digital economy.

KEYWORDS

Digital literacy, digital payment, financial behavior, financial inclusion, rural community



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adopsi sistem pembayaran digital pada masyarakat pedesaan serta dampaknya terhadap perilaku keuangan, dengan studi kasus di Desa Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (mixed methods) untuk memberikan analisis yang komprehensif. Data kuantitatif dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS), sementara data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam untuk memperkaya temuan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi pembayaran digital di wilayah pedesaan belum menjadi kebiasaan sehari-hari. Faktor persepsi kemudahan, kemanfaatan, kepercayaan, literasi digital, serta akses infrastruktur terbukti berpengaruh positif terhadap adopsi sistem tersebut. Lebih lanjut, penggunaan pembayaran digital berkontribusi pada perbaikan perilaku keuangan masyarakat, khususnya dalam hal pencatatan transaksi, pengendalian pengeluaran, dan pola menabung. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan infrastruktur digital dan peningkatan literasi merupakan prasyarat utama dalam mendorong inklusi keuangan yang berkelanjutan di pedesaan. Secara teoretis, penelitian ini menghubungkan antara adopsi teknologi dengan keuangan berperilaku, serta memberikan implikasi strategis bagi pengambil kebijakan dalam mempercepat ekonomi digital yang inklusif.

KATA KUNCI:

Inklusi keuangan,
literasi digital,
pembayaran digital,
perilaku keuangan,
masyarakat desa

PENDAHULUAN

Percepatan digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia Percepatan digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia merupakan agenda strategis nasional yang diperkuat melalui *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025* oleh Bank Indonesia. Dokumen ini menekankan lima visi utama, yaitu: (1) integrasi ekonomi dan keuangan digital, (2) digitalisasi perbankan, (3) penguatan infrastruktur pembayaran, (4) pengembangan regulasi adaptif, dan (5) penguatan ekosistem inklusi keuangan. Salah satu instrumen utama dalam mewujudkan visi tersebut adalah perluasan adopsi sistem pembayaran digital seperti QRIS, mobile banking, dan *e-wallet* ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk wilayah perdesaan dan daerah tertinggal (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2023). Dalam konteks tersebut, pengembangan instrumen pembayaran digital seperti QRIS, *mobile banking*, dan *e-wallet* menjadi pilar penting untuk memperluas akses keuangan, khususnya bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau layanan perbankan formal. Studi (Rahmawati & Nugroho, 2023) menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran mampu meningkatkan efisiensi transaksi dan transparansi keuangan, terutama di wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi berbasis perdagangan. Namun demikian, sebagian besar implementasi dan penelitian masih terfokus pada wilayah perkotaan dan pelaku UMKM yang relatif telah melek teknologi

Digitalisasi sistem pembayaran diyakini mampu meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas akses layanan keuangan formal, serta mengurangi biaya transaksi dan risiko yang terkait dengan penggunaan uang tunai, seperti potensi kehilangan, pencurian, dan ketidaktransparanan. Selain itu, digitalisasi berpotensi besar mendorong partisipasi ekonomi masyarakat desa melalui peningkatan akses terhadap layanan keuangan modern, sehingga

mendukung percepatan pembangunan ekonomi lokal. Namun, transformasi ini tidak berjalan merata. Penelitian (Setiawan & Yuliani, 2022) menunjukkan bahwa tantangan terbesar justru terjadi pada masyarakat pedesaan. Pertama, akses teknologi digital masih terbatas, baik dari sisi ketersediaan jaringan internet yang stabil maupun kepemilikan perangkat seperti smartphone yang memadai. Banyak wilayah pedesaan, termasuk sejumlah desa di Lampung Timur, menghadapi masalah konektivitas yang menyebabkan transaksi digital tidak selalu dapat dilakukan secara lancar. Kedua, literasi digital dan literasi keuangan masyarakat desa relatif rendah. Meskipun penetrasi smartphone meningkat, pemahaman warga terhadap fitur-fitur layanan digital seperti QRIS, keamanan transaksi, manajemen PIN/OTP, dan risiko penipuan masih minim. Kondisi ini menyebabkan masyarakat ragu untuk menggunakan layanan digital karena khawatir melakukan kesalahan atau terjebak dalam modus penipuan daring. Ketiga, kepercayaan terhadap sistem pembayaran digital masih menjadi hambatan signifikan. Masyarakat desa cenderung lebih nyaman menggunakan uang tunai karena bersifat fisik dan dianggap lebih “nyata” serta mudah dipahami. Pengalaman negatif seperti kegagalan transaksi, biaya admin yang tidak dipahami, atau lambatnya konfirmasi pembayaran sering kali memperkuat resistensi warga terhadap penggunaan layanan digital.

Keempat, terdapat hambatan budaya dan kebiasaan transaksi tunai yang sudah mengakar kuat. Dalam konteks pedesaan seperti Desa Pekalongan, hubungan ekonomi berbasis kepercayaan sosial (*social trust*) antarwarga, seperti pembayaran hutang-piutang harian, belanja di warung, dan transaksi di pasar tradisional, masih dilakukan secara tunai karena dianggap lebih sederhana dan fleksibel. Kehadiran sistem pembayaran digital belum sepenuhnya mampu menggantikan pola interaksi ini. Kelima, dari sisi kelembagaan, kapasitas agen layanan keuangan di desa masih terbatas, baik dalam jumlah maupun kemampuan memberikan edukasi. Meskipun agen BRILink, BNI Agen46, dan layanan serupa telah menjangkau banyak desa, sering kali agen hanya berfungsi sebagai titik transaksi, bukan pusat literasi keuangan digital. Dengan demikian, meskipun digitalisasi sistem pembayaran memiliki potensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan dan efisiensi ekonomi di pedesaan, implementasinya masih menghadapi hambatan struktural, sosial, dan teknologis yang harus ditangani melalui kebijakan yang lebih kolaboratif dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, literatur inklusi keuangan digital menekankan bahwa keberhasilan transformasi sistem pembayaran tidak hanya ditentukan oleh aspek teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sosial, perilaku finansial, dan kepercayaan masyarakat (Alliance for Financial Inclusion, 2022). *Technology Acceptance Model* (TAM) (Davis, 1989) menjadi kerangka teoritis yang relevan untuk menjelaskan perilaku adopsi pembayaran digital di pedesaan. TAM menekankan bahwa penerimaan teknologi ditentukan oleh dua konstruk utama, yaitu *perceived usefulness* (persepsi kemanfaatan) dan *perceived ease of use* (persepsi kemudahan penggunaan), yang selanjutnya memengaruhi sikap dan niat penggunaan teknologi. Dalam konteks masyarakat desa, persepsi terhadap manfaat pembayaran digital, seperti kemudahan transaksi dan efisiensi waktu, sering kali berhadapan dengan persepsi kesulitan penggunaan, risiko keamanan, dan ketidakpastian teknologi, sehingga memengaruhi tingkat adopsi secara keseluruhan. Oleh karena itu, teori TAM digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis untuk memahami relasi antara faktor persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat desa dalam menggunakan sistem pembayaran digital.

Desa Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, merupakan komunitas agraris–

perdagangan di mana kegiatan ekonomi utama masih didominasi oleh sektor pertanian (palm oil, karet, dan kelapa) serta perdagangan lokal dan pasar tradisional. Profil pembangunan Kabupaten Lampung Timur mencatat bahwa struktur ekonomi daerah masih sangat bergantung pada subsektor primer tersebut, sehingga karakter aktivitas ekonomi desa bersifat musiman dan terpusat pada rantai nilai komoditas pertanian serta perdagangan ritel lokal. Hal ini penting karena pola transaksi di sektor-sektor tersebut cenderung tradisional dan berbasis tunai. Sejak 2021 ada indikasi peningkatan penetrasi layanan keuangan digital di pedesaan termasuk Desa Pekalongan, khususnya lewat hadirnya agen perbankan (mis. Agen BRILink) yang memperluas titik layanan perbankan ke desa-desa dan melalui perluasan merchant QRIS. Bank Indonesia melaporkan lonjakan jumlah merchant QRIS yang sangat pesat: hingga Oktober 2023 tercatat sekitar 29,6 juta merchant di seluruh Indonesia, dan 92% di antaranya adalah UMKM, indikator yang menunjukkan bahwa infrastruktur akseptansi (*merchant acceptance*) telah berkembang luas walau belum merata di semua wilayah. Pada level akses layanan perbankan, BRI melalui jaringan agen BRILink juga telah menjangkau puluhan ribu desa, yang membuka kanal distribusi layanan digital di daerah pinggiran. Kedua perkembangan ini membuka peluang adopsi di desa, termasuk Pekalongan, karena merchant lokal dan agen menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk mencoba QRIS, *e-wallet*, atau layanan mobile banking.

Meskipun infrastruktur layanan (merchant QRIS, agen) mulai hadir, intensitas penggunaan di pedesaan masih terkendala oleh dua dimensi akses: konektivitas dan perangkat. Secara nasional penetrasi internet dan penggunaan ponsel terus meningkat. Data APJII menunjukkan penetrasi internet nasional mencapai sekitar 78% pada 2023 (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2023), sedangkan publikasi BPS telecommunication menunjukkan persentase kepemilikan telepon seluler yang stabil naik pada periode 2021 hingga 2022, tetapi angka agregat nasional ini menyamarkan kesenjangan urban dan rural. Di banyak desa, kualitas sinyal (keandalan) dan ketersediaan paket data yang terjangkau masih menjadi masalah sehingga transaksi real-time (mis. QRIS saat jam sibuk pasar) dapat terganggu; kondisi inilah yang menahan transformasi dari “terpakai sesekali” menjadi “kebiasaan harian”. Oleh karena itu, walau penetrasi perangkat dan internet meningkat, ketimpangan akses antarwilayah membuat transformasi cashless di pedesaan berjalan lebih lambat dibanding perkotaan. (Badan Pusat Statistik, 2022, 2023)

Penelitian terdahulu mengenai pembayaran digital di Indonesia sebagai besar berfokus pada masyarakat perkotaan dan pelaku UMKM yang telah relatif terdigitalisasi dengan menekankan pada faktor adopsi teknologi dan efisiensi transaksi (Rahmawati & Nugroho, 2023). Sementara itu, studi yang menelaah konteks pedesaan masih terbatas dan umumnya bersifat deskriptif, dengan fokus pada hambatan infrastruktur dan literasi digital tanpa mengaitkannya dengan perubahan perilaku keuangan masyarakat secara empiris (Setiawan & Yuliani, 2022). Kedua penelitian tersebut belum menempatkan perilaku finansial masyarakat sebagai *variable outcome* utama untuk menilai keberhasilan transformasi digital di pedesaan, sehingga masih terdapat keterbatasan konseptual dalam memahami dampak nyata adopsi pembayaran digital terhadap pengelolaan keuangan masyarakat desa. Selain itu, minimnya pengujian kuantitatif yang mengintegrasikan faktor adopsi dan perubahan perilaku finansial menyebabkan celah empiris yang signifikan dalam literatur. Oleh karena itu, penelitian ini menajamkan *research gap* dengan mengkaji secara stimulan determinan

adopsi pembayaran digital dan dampaknya terhadap perilaku finansial masyarakat desa, sehingga memberikan kontribusi teoritis dan empiris yang lebih komprehensif dalam studi inklusi keuangan di wilayah pedesaan.

Dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi adopsi pembayaran digital di masyarakat pedesaan, penelitian ini menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM) sebagai kerangka konseptual utama. TAM menekankan bahwa penerimaan suatu teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*), yang selanjutnya memengaruhi niat dan perilaku penggunaan teknologi. Teori ini relevan digunakan sebagai pisau analisis untuk memahami relasi antar variabel dalam penelitian ini, khususnya dalam menjelaskan bagaimana kemudahan dan kemanfaatan pembayaran digital mendorong adopsi teknologi di masyarakat desa. Selain itu, kerangka TAM dalam penelitian ini diperkaya dengan variabel kepercayaan, literasi digital, dan akses infrastruktur untuk menangkap kompleksitas konteks pedesaan yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh faktor teknologi semata.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memposisikan diri dalam perdebatan akademik mengenai adopsi teknologi keuangan dengan menekankan konteks pedesaan. Dengan menggunakan kerangka TAM. Penelitian ini akan mengkaji : 1) Analisis tentang perubahan perilaku finansial Masyarakat desa akibat penggunaan pembayaran digital; dan 2) Mengidentifikasi hambatan sistemik dan sosial – budaya yang menghambat inklusi keuangan digital di desa. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya memperkaya literatur inklusi keuangan digital, tetapi juga memberikan implikasi kebijakan berbasis wilayah (*place-based approach*) agar percepatan digitalisasi sistem pembayaran benar-benar mendorong inklusi keuangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Technology Acceptance Model (TAM) (Davis, 1989) merupakan model yang paling sering digunakan untuk menjelaskan penerimaan teknologi. TAM menyatakan bahwa dua konstruk utama yaitu *perceived usefulness* (PU) dan *Perceived Ease of Use* (PEOU) berpengaruh langsung terhadap niat dan penggunaan actual teknologi. Dalam konteks pembayaran digital, PU terkait dengan persepsi bahwa transaksi digital memberikan manfaat, seperti efisiensi waktu, keamanan, dan kenyamanan. Sementara PEOU menggambarkan persepsi pengguna mengenai kemudahan mengoperasikan aplikasi *e-wallet*, *mobile banking*, atau memindai QRIS. Penelitian terbaru (Muchtar, 2024; Ramayanti, 2025) menunjukkan bahwa TAM masih relevan dalam menjelaskan adopsi layanan pembayaran digital di Indonesia. Kedua penelitian tersebut menemukan bahwa PU dan PEOU secara signifikan mempengaruhi niat menggunakan QRIS, OVO, ShopeePay, dan *mobile banking*.

Teori *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (Venkatesh, 2003) memperluas TAM dan menambahkan empat konstruk penting : (1) *Performance Expectancy*, ekspektasi penggunaan bahwa teknologi meningkatkan efektivitas; (2) *effort Expectancy*, persepsi kemudahan penggunaan teknologi; (3) *social influence*, pengaruh keuangan, pedagang, teman dan komunitas; dan (4) *facilitating Conditions*, ketersediaan perangkat sinyal internet, agen layanan dan dukungan teknis. Dalam konteks pedesaan, konstruk

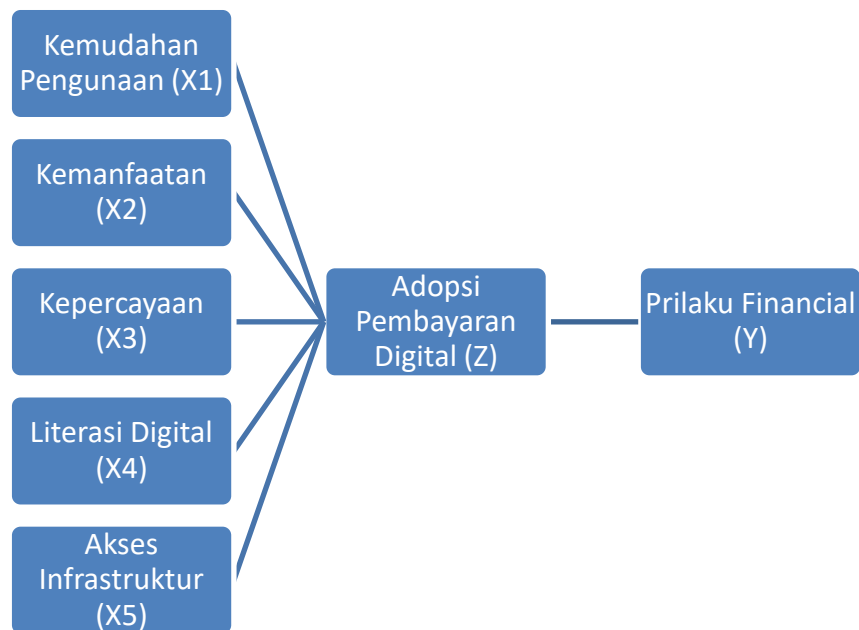
Facilitating Conditions menjadi faktor kritis. Infrastruktur (sinyal internet), keberadaan agen BRILink, dan ketersediaan smartphone menjadi penentu utama apakah warga dapat menggunakan pembayaran digital secara rutin. Studi terbaru UTAUT-QRIS (Hanifah, 2025) juga menegaskan bahwa *social influence* dan *facilitating conditions* memiliki pengaruh signifikan pada tingkat adopsi di wilayah rural.

McKnight et al. (McKnight, Choudhury, & Kacmar, 2002) menjelaskan bahwa Trust atau kepercayaan adalah faktor kunci dalam transaksi digital. Kepercayaan terdiri dari: (1) Integritas, keyakinan bahwa sistem bekerja secara jujur; (2) Kemampuan, kemampuan sistem/penyedia dalam mengelola transaksi; (3) Keyakinan, keyakinan bahwa penyedia layanan memperhatikan keamanan pengguna. Dalam pembayaran digital, kepercayaan mencakup keamanan data, keandalan transaksi, dan perlindungan dari penipuan. Penelitian terbaru (Addy P, 2024; Narula S, 2023) menunjukkan bahwa kepercayaan memiliki pengaruh kuat terhadap penggunaan QRIS dan mobile banking di negara berkembang.

Literasi keuangan digital adalah kemampuan individu memahami dan menggunakan layanan keuangan berbasis teknologi secara aman dan efektif (OECD, 2018; OJK, 2021). Komponen literasi digital meliputi: (1) mengoperasikan aplikasi digital; (2) Memahami biaya dan fitur transaksi; (3) mengetahui keamanan digital; (4) kemampuan top-up dan transfer. Sedangkan Inklusi keuangan digital adalah kemampuan masyarakat mengakses, memahami, dan menggunakan layanan keuangan digital secara berkelanjutan (Addy P, 2024). Indikator inklusi keuangan digital mencakup akses layanan, penggunaan layanan dan kualitas penggunaan. di pedesaan, hambatan utama adalah rendahnya akses internet, minimnya perangkat, keterbatasan agen layanan dan budaya tunai (Setiawan & Yuliani, 2022)

Perilaku finansial menjelaskan bagaimana individu mengelola, membelanjakan dan menabung atau mencatat keuangan berdasarkan factor psikologis dan situasional (Kahneman & Tversky, 1979; Shefrin, 2020). Pembayaran digital memiliki potensi memengaruhi perilaku finansial melalui Riwayat transaksi, notifikasi, kemudahan menabung digital dan mendorong perilaku lebih disiplin. Riset terbaru (Paramita & Cahyadi, 2024) menunjukkan hubungan positif antara penggunaan pembayaran digital dan disiplin keuangan pada generasi muda. Kemudahan dalam memanfaatkan teknologi meningkatkan kemungkinan masyarakat mencoba layanan pembayaran digital. Namun agar adopsi menjadi kebiasaan, diperlukan dukungan infrastruktur (sinyal, perangkat) dan kepercayaan terhadap keamanan. Literasi digital memperkuat pemahaman terhadap fitur dan risiko. Ketika adopsi meningkat (frekuensi lebih rutin), maka pola keuangan individu mulai berubah, seperti meningkatnya pencatatan transaksi, pengelolaan biaya, dan kecenderungan menabung. Hal ini tergambar pada krangka konseptual sebagai berikut :

Gambar 1. Krangka Konseptual



Sumber : olah data peneliti 2025

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) dengan didominasi pendekatan kuantitatif. Metode ini dipilih agar hasil penelitian tidak hanya didukung oleh angka, tetapi juga diperkuat dengan temuan kualitatif yang bersifat kontekstual. Lokasi penelitian berada di desa Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Populasi penelitian meliputi : Pelaku UMKM, petani dan pedagang pasar, pengguna agen layanan keuangan serta rumah tangga umum. Responden berjumlah 120 orang dengan Teknik sampling berupa *purposive sampling* dengan kriteria responden berusia ≥ 17 tahun dan pernah menggunakan layanan digital seperti *Qris*, *mobile-banking* dan *e-wallet*. Penetapan batas usia tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa responden telah memiliki kapasitas hukum dan kognitif yang memadai untuk memahami instrumen penelitian serta mampu mengevaluasi pengalaman penggunaan layanan keuangan digital secara rasional. Sementara itu, kriteria pengalaman menggunakan layanan pembayaran digital diperlukan untuk memastikan bahwa responden memiliki paparan langsung terhadap objek penelitian, sehingga jawaban yang diberikan bersifat faktual dan berbasis pengalaman nyata, bukan persepsi hipotesis.

Untuk memperkuat kedalaman analisis kualitatif, wawancara dilakukan terhadap informan kunci yang dipilih secara purposif terdiri 1 kepala desa, 2 staf pemerintah desa, 3 pelaku UMKM, 1 agen laku pandai dan 2 tokoh masyarakat. Pemilihan informan didasarkan pada peran strategis mereka dalam ekosistem ekonomi dan keuangan desa. Aparatur desa dan tokoh masyarakat memberikan perspektif kebijakan dan sosio-budaya, sementara pelaku UMKM dan agen laku pandai memberikan gambaran praktis mengenai penggunaan dan gambaran pembayaran digital di tingkat operasional. Kombinasi responden survei dan informan kunci tersebut meningkatkan keandalan (*reliability*) dan validitas data, karena memungkinkan proses triangulasi sumber antara data kuantitatif dan kualitatif. Dengan

demikian, hasil penelitian tidak hanya mencerminkan kecenderungan statistik, tetapi juga konteks sosial dan institusional yang memengaruhi adopsi pembayaran digital di masyarakat desa. Instrument penelitian berupa kuesioner skala likert 1-5 mencakup : 1) kemudahan penggunaan; 2) manfaat penggunaan; 3) kepercayaan; 4) perubahan perilaku finansial dan 5) hambatan akses sedangkan untuk instrument kualitatif berupa pedoman wawancara semi-terstruktur. Teknik analisis data yang dilakukan pada pendekatan kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif dan uji korelasi antar variabel. Sedangkan kualitatif dengan menggunakan thematic analysis untuk menemukan pola hambatan dan dinamika sosial. Triangulasi digunakan untuk memperkuat validitas hasil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melibatkan 120 responden Masyarakat Desa Pekalongan Lampung Timur yang dipilih melalui metode survei. Komposisi gender menunjukkan bahwa perempuan sebanyak (52%) sedikit lebih banyak dibandingkan laki – laki (48%). Hal ini mencerminkan realitas sosial pedesaan, dimana Perempuan memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi rumah tangga, pengelolaan belanja dan pengambilan Keputusan finansial sehari-hari. Dominasi responden perempuan juga mengindikasikan keterlibatan aktif ibu rumah tangga dan pedagang perempuan dalam proses transaksi—baik tunai maupun digital. Berdasarkan pekerjaan, kelompok petani (37%) mendominasi responden, diikuti oleh pedagang (26%), ibu rumah tangga (17%), karyawan (12%), dan pekerjaan lain (8%). Distribusi ini menunjukkan struktur ekonomi Desa Pekalongan yang berbasis pada sektor agraris dan perdagangan informal. Kondisi ini juga relevan dengan topik penelitian, karena petani dan pedagang merupakan kelompok yang paling sering melakukan transaksi keuangan harian, sehingga keterbukaan terhadap pembayaran digital sangat dipengaruhi oleh kebiasaan transaksi mereka.

Dari sisi akses teknologi, 94% responden memiliki smartphone, yang menunjukkan tingkat penetrasi perangkat digital yang cukup tinggi di masyarakat desa. Angka ini memberikan indikasi positif bahwa perangkat pendukung pembayaran digital sudah tersedia secara luas. Meskipun demikian, hanya 68% responden yang pernah menggunakan pembayaran digital seperti QRIS, *e-wallet*, atau *mobile banking*. Artinya terdapat kesenjangan antara kepemilikan perangkat dan pemanfaatan teknologi keuangan digital. Temuan tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan perangkat tidak secara otomatis mendorong penggunaan layanan digital. Faktor seperti literasi digital, kepercayaan terhadap keamanan sistem, kondisi infrastruktur internet, dan budaya transaksi tunai masih menjadi aspek penentu yang memengaruhi tingkat adopsi. Dengan demikian, meskipun prasyarat teknis seperti smartphone telah terpenuhi, transformasi menuju masyarakat cashless masih memerlukan dukungan edukasi, sosialisasi, dan peningkatan keandalan layanan di tingkat desa.

Pengujian Hasil Penelitian

Uji Validitas (Outer Loading)

Pengujian validitas indikator dilakukan menggunakan nilai *outer loading* dengan batas minimal 0,70. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel Kemudahan Penggunaan, Kemanfaatan, Kepercayaan, Literasi Digital, Akses Infrastruktur,

Adopsi Pembayaran Digital, dan Perilaku Finansial memiliki nilai *outer loading* berada pada rentang 0.71 hingga 0.89. dengan hasil data sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Uji Validasi (*Outer Loading*)

Variabel	Kode Indikator	Outer Loading	Keterangan
Kemudahan Penggunaan (X1)	PEOU1	0.78	Valid
	PEOU2	0.83	Valid
	PEOU3	0.81	Valid
	PEOU4	0.76	Valid
	PEOU5	0.79	Valid
Kemanfaatan (X2)	PU1	0.84	Valid
	PU2	0.82	Valid
	PU3	0.79	Valid
	PU4	0.85	Valid
	PU5	0.87	Valid
Kepercayaan (X3)	TR1	0.88	Valid
	TR2	0.85	Valid
	TR3	0.80	Valid
	TR4	0.83	Valid
	TR5	0.89	Valid
Literasi Digital (X4)	DFL1	0.74	Valid
	DFL2	0.79	Valid
	DFL3	0.77	Valid
	DFL4	0.75	Valid
	DFL5	0.78	Valid
Akses Infrastruktur (X5)	FC1	0.73	Valid
	FC2	0.76	Valid
	FC3	0.81	Valid
	FC4	0.71	Valid
	FC5	0.77	Valid
Adopsi Pembayaran Digital (Z)	AD1	0.84	Valid
	AD2	0.78	Valid
	AD3	0.82	Valid
	AD4	0.85	Valid
	AD5	0.88	Valid
Perilaku Finansial (Y)	FB1	0.79	Valid
	FB2	0.83	Valid
	FB3	0.86	Valid
	FB4	0.82	Valid
	FB5	0.87	Valid

Sumber : Data primer yang diolah (2025)

Seluruh indikator memiliki nilai *outer loading* ≥ 0.71 sehingga seluruh indikator valid dan layak digunakan dalam model SEM-PLS. Tidak ada indikator yang dihapus karena seluruhnya memenuhi kriteria validitas konvergen.

Hasil Uji Reliabilitas

Hasil Cronbach's Alpha menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai di atas 0.80, yang berarti reliabilitas berada pada kategori baik hingga sangat baik. Variabel dengan nilai tertinggi adalah Kepercayaan (0.90), menunjukkan konsistensi internal yang sangat kuat. Nilai reliabilitas untuk seluruh variabel dirangkum sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Status
Kemudahan Penggunaan	0.87	Reliabel
Kemanfaatan	0.88	Reliabel
Kepercayaan	0.90	Reliabel
Literasi Digital	0.85	Reliabel
Akses Infrastruktur	0.82	Reliabel
Adopsi Pembayaran Digital	0.88	Reliabel
Perilaku Finansial	0.89	Reliabel

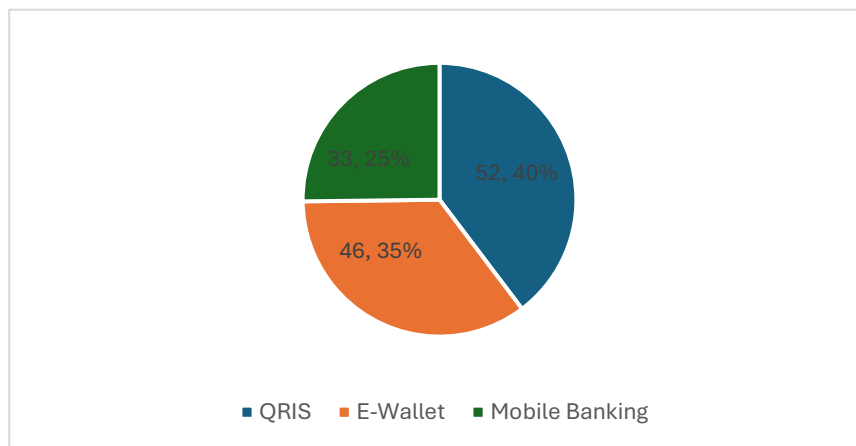
Sumber : Data primer yang diolah (2025)

Dari hasil uji reabilitas menunjukkan Semua variabel dalam penelitian ini menunjukkan nilai reliabilitas yang sangat baik, dengan koefisien Cronbach's Alpha berada di atas batas minimal 0,70. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa setiap item pernyataan pada masing-masing variabel memiliki konsistensi internal yang kuat dan mampu mengukur konstruk yang dimaksud secara stabil. Dengan demikian, seluruh instrumen penelitian dapat dinyatakan reliabel, layak digunakan untuk pengumpulan data, serta mampu menghasilkan temuan empiris yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Tingkat Adopsi Pembayaran Digital

Hasil survei dari 120 responden, menunjukkan bahwa QRIS menjadi layanan pembayaran digital yang paling sering digunakan oleh masyarakat Desa Pekalongan, disusul dengan *e-wallet* seperti DANA, OVO dan *ShopeePay*, dengan persentase pengguna dalam gambar dibawah ini :

Gambar 2. Tingkat Penggunaan Pembayaran Digital



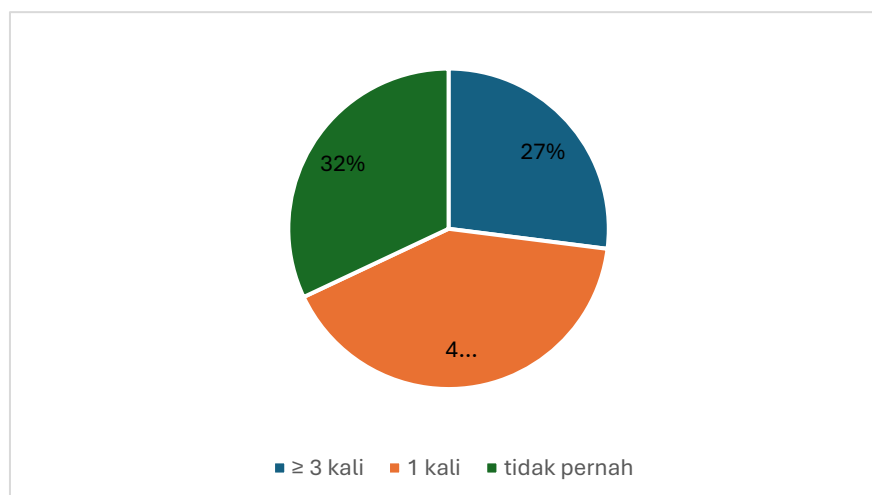
Sumber : Data primer yang diolah (2025)

Pola ini mencerminkan preferensi masyarakat terhadap layanan yang paling sederhana, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan transaksi harian di tingkat lokal. Dominannya penggunaan QRIS dapat dijelaskan oleh semakin banyaknya warung, pedagang pasar, dan pelaku UMKM desa yang telah menjadi merchant QRIS. Sistem QRIS dianggap praktis karena tidak memerlukan input nomor rekening atau nomor tujuan, sehingga mengurangi risiko kesalahan transaksi. Hal ini sangat penting bagi masyarakat desa yang masih memiliki keterbatasan literasi digital dan cenderung berhati-hati dalam menggunakan teknologi keuangan.

Sementara itu, penggunaan *e-wallet* berada pada posisi kedua karena dipengaruhi oleh tren belanja daring, pembelian pulsa, dan pembayaran layanan digital lainnya, terutama di kalangan usia muda. Namun, penggunaan *e-wallet* masih bersifat kontekstual dan fungsional, yakni digunakan ketika ada kebutuhan tertentu seperti promo, diskon, atau transaksi online, bukan sebagai alat pembayaran utama dalam aktivitas ekonomi harian. Adopsi mobile banking relatif lebih rendah dibandingkan dua layanan lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tidak semua masyarakat memiliki rekening bank, proses registrasi yang dianggap rumit, serta kekhawatiran terhadap risiko salah transfer. Mobile banking juga dipersepsikan lebih kompleks dibandingkan QRIS dan *e-wallet*, sehingga kurang diminati oleh masyarakat dengan tingkat literasi digital yang terbatas.

Dari survei yang dilakukan dengan 120 responden didapat data hanya 68% responden yang menyatakan pernah menggunakan pembayaran digital. Namun dilihat dari intensitas penggunaan, hasil survei menunjukkan intensitas penggunaan masih tergolong rendah seperti terlihat di gambar dibawah ini :

Gambar 3. Intensitas Pembayaran Digital Per-bulan



Sumber : Data primer yang diolah (2025)

Data tersebut menunjukkan 27% responden yang menggunakan pembayaran digital lebih dari tiga kali dalam seminggu, yang mengindikasikan kelompok pengguna aktif atau *habitual users*. Kelompok ini umumnya terdiri dari pedagang, generasi muda, dan masyarakat dengan akses internet yang stabil. Sebaliknya, 41% responden menggunakan pembayaran digital hanya sebulan sekali atau pada saat kebutuhan tertentu, seperti pembayaran tagihan, pembelian pulsa, atau belanja online. Kelompok ini dapat dikategorikan sebagai *situational users*, yakni pengguna yang belum menjadikan pembayaran digital sebagai kebiasaan, tetapi masih bergantung pada uang tunai dalam transaksi sehari-hari. Lebih lanjut, terdapat 32% responden yang tidak pernah menggunakan pembayaran digital sama sekali. Kelompok ini umumnya didominasi oleh masyarakat berusia lanjut, petani, dan individu dengan keterbatasan akses infrastruktur maupun literasi digital. Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi menuju *cashless society* di pedesaan masih menghadapi tantangan struktural dan sosial yang signifikan. Secara keseluruhan, temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tingkat adopsi dan intensitas penggunaan. Meskipun sebagian besar

masyarakat telah mengenal dan mencoba pembayaran digital, penggunaan tersebut belum bertransformasi menjadi kebiasaan rutin. Hal ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa adopsi pembayaran digital di pedesaan masih bersifat parsial dan situasional, serta sangat bergantung pada konteks kebutuhan dan dukungan infrastruktur.

Pengaruh Variabel Terhadap Adopsi Pembayaran Digital

Pengaruh variable independent terhadap adopsi pembayaran digital menunjukkan hasil SEM-PLS bahwa seluruh variable independent yang diuji memiliki pengaruh signifikan terhadap adopsi pembayaran digital, ditunjukkan oleh nilai p-value < 0.05. Berikut penjelasan mendalam untuk masing-masing hubungan:

Tabel 3. Pengaruh Variabel Independent terhadap adopsi pembayaran Digital

Hubungan	Koefisien	p-value	Kesimpulan
Kemudahan → Adopsi	0.28	0.004	Signifikan
Kemanfaatan → Adopsi	0.31	0.001	Signifikan
Kepercayaan → Adopsi	0.25	0.012	Signifikan
Literasi Digital → Adopsi	0.22	0.030	Signifikan
Akses Infrastruktur → Adopsi	0.34	0.000	Signifikan

Sumber : Data primer yang diolah (2025)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap adopsi pembayaran digital di Desa Pekalongan. Nilai koefisien 0.28 mengindikasikan bahwa ketika masyarakat merasa QRIS atau *e-wallet* mudah dipelajari dan dioperasikan, maka kecenderungan mereka untuk menggunakan layanan tersebut meningkat. Temuan ini sejalan dengan teori *Technology Acceptance Model* (TAM), yang menempatkan *perceived ease of use* sebagai faktor fundamental dalam niat menggunakan teknologi (Davis, 1989). Konsistensi hasil ini juga ditemukan pada penelitian (Rahmawati & Nugroho, 2023) di wilayah perkotaan, yang menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan mendorong adopsi QRIS secara signifikan. Namun, penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa di konteks pedesaan, kemudahan penggunaan berperan sebagai pemicu awal (*initial trigger*) bagi masyarakat untuk mencoba teknologi pembayaran digital, terutama pada kelompok usia muda. Sebaliknya, kelompok usia lanjut masih menghadapi kendala operasional, sebagaimana terungkap dalam wawancara, sehingga menegaskan adanya kesenjangan adopsi berbasis usia dan literasi digital di wilayah pedesaan.

Variabel kemanfaatan memiliki pengaruh signifikan dengan koefisien yang cukup kuat, yaitu 0.31. Ini menandakan bahwa masyarakat akan lebih terdorong menggunakan QRIS/*e-wallet* apabila mereka merasakan manfaat nyata seperti: (1) transaksi lebih cepat, (2) tidak perlu menyiapkan uang tunai, (3) memudahkan belanja online dan (4) membantu pembayaran tagihan. Hasil ini konsisten dengan penelitian (Muchtar, 2024) dan (Ramayanti, 2025) yang menyatakan bahwa persepsi manfaat, seperti efisiensi waktu dan kemudahan transaksi, menjadi faktor dominan dalam adopsi *e-wallet* dan QRIS. Temuan penelitian ini memperkaya literatur dengan menunjukkan bahwa manfaat pembayaran digital di pedesaan masih bersifat kontekstual dan fungsional, terutama untuk kebutuhan tertentu seperti top-up pulsa, belanja daring, dan pembayaran tagihan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa

kemanfaatan menjadi faktor transisional yang mendorong pergeseran dari penggunaan situasional menuju penggunaan yang lebih rutin, meskipun belum sepenuhnya membentuk kebiasaan harian.

Kepercayaan menjadi faktor signifikan dengan koefisien 0.25. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keamanan transaksi digital, termasuk: 1) kepercayaan terhadap penyedia layanan, 2) keyakinan bahwa data dan saldo aman, 3) minimnya risiko kesalahan saat transfer dan 4) perlindungan terhadap penipuan digital. Hasil wawancara memperkuat temuan ini. Temuan ini sejalan dengan studi (McKnight et al., 2002) serta (Narula S, 2023) yang menekankan bahwa kepercayaan merupakan prasyarat utama dalam transaksi digital, khususnya di negara berkembang. Penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa di pedesaan, kepercayaan tidak hanya berkaitan dengan keamanan sistem, tetapi juga dengan pengalaman sosial dan narasi kolektif mengenai penipuan atau kegagalan transaksi. Ketakutan akan salah transfer dan penipuan digital menyebabkan sebagian pengguna membatasi penggunaan pembayaran digital pada situasi tertentu, sehingga kepercayaan menjadi faktor kunci dalam transisi dari *initial users* menjadi *habitual users*.

Pengaruh literasi digital signifikan dengan koefisien 0.22. Meskipun tidak sebesar variabel lain, literasi digital tetap menjadi faktor penting yang menjelaskan keberhasilan penggunaan teknologi di pedesaan. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya (Setiawan & Yuliani, 2022) yang menemukan bahwa rendahnya literasi digital menjadi penghambat utama inklusi keuangan digital di pedesaan. Penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan menunjukkan bahwa literasi digital berfungsi sebagai fondasi operasional, yang memungkinkan masyarakat menggunakan teknologi secara aman dan berkelanjutan. Responden yang memahami fitur dasar aplikasi keuangan—seperti top-up, pengecekan riwayat transaksi, dan pengelolaan keamanan PIN/OTP—cenderung menunjukkan tingkat adopsi yang lebih tinggi. Sebaliknya, keterbatasan literasi pada kelompok usia lanjut dan berpendidikan rendah memperkuat kesenjangan penggunaan teknologi di masyarakat desa.

Variabel Akses Infrastruktur merupakan variabel paling dominan, dengan koefisien 0.34. Ini menunjukkan bahwa bahkan jika teknologi mudah dan bermanfaat, masyarakat tetap tidak akan menggunakannya jika infrastruktur tidak mendukung, terutama: 1) sinyal internet yang stabil, 2) kepemilikan smartphone, 3) ketersediaan jaringan listrik dan 4) adanya agen BRILink, ATM, atau merchant QRIS. Wawancara mendalam mengungkapkan bahwa banyak warga mengeluhkan: “sinyal hilang saat sore hari, aplikasi tidak bisa dibuka saat jaringan lemah”. Hasil wawancara, 8 desember 2025.

Pedagang pasar menambahkan bahwa mereka bersedia menerima QRIS tetapi sinyal sering membuat transaksi gagal. Dalam konteks pedesaan, infrastruktur adalah prasyarat utama. Tanpa infrastruktur yang baik, adopsi digital payment tidak mungkin meningkat. Hasil analisis SEM-PLS menunjukkan bahwa akses infrastruktur memiliki koefisien tertinggi ($\beta = 0.34$; $p = 0.000$) dibandingkan variabel lainnya, sehingga dapat disimpulkan sebagai faktor paling dominan dalam mendorong adopsi pembayaran digital di Desa Pekalongan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi sistem pembayaran di wilayah pedesaan sangat ditentukan oleh kesiapan infrastruktur fisik dan digital yang tersedia.

Infrastruktur dalam penelitian ini mencakup ketersediaan jaringan internet yang stabil, kepemilikan perangkat smartphone yang memadai, akses listrik, serta keberadaan agen layanan keuangan dan merchant QRIS. Meskipun masyarakat telah memiliki persepsi positif terhadap kemudahan dan kemanfaatan teknologi, keterbatasan infrastruktur sering kali menjadi penghambat utama dalam penggunaan yang berkelanjutan. Hal ini tercermin dari temuan kualitatif di lapangan, di mana responden menyatakan bahwa transaksi digital sering gagal akibat sinyal internet yang tidak stabil, khususnya pada jam-jam tertentu. Dominannya pengaruh infrastruktur menunjukkan bahwa adopsi teknologi di pedesaan bersifat “infrastructure-driven”, bukan semata-mata “user-driven”. Artinya, kesiapan individu saja tidak cukup tanpa dukungan lingkungan yang memadai. Kondisi ini berbeda dengan wilayah perkotaan, di mana akses internet dan perangkat sudah relatif merata, sehingga faktor psikologis seperti kepercayaan dan persepsi manfaat menjadi lebih dominan.

Selain itu, keberadaan agen BRILink dan merchant QRIS terbukti berperan sebagai katalis adopsi. Agen tersebut tidak hanya menyediakan layanan transaksi, tetapi juga berfungsi sebagai sumber edukasi informal bagi masyarakat desa. Warga yang mengalami kesulitan teknis cenderung lebih percaya menggunakan pembayaran digital ketika ada pihak yang dapat membantu secara langsung. Hal ini memperkuat peran *facilitating conditions* sebagaimana dijelaskan dalam teori UTAUT. Temuan ini juga mengindikasikan adanya kesenjangan digital (*digital divide*) antara wilayah desa dan kota. Ketimpangan infrastruktur menyebabkan adopsi pembayaran digital di desa bersifat situasional dan belum menjadi kebiasaan harian. Masyarakat cenderung kembali menggunakan uang tunai ketika infrastruktur tidak mendukung, meskipun mereka telah memiliki pengalaman positif menggunakan pembayaran digital sebelumnya.

Dengan demikian, peningkatan adopsi pembayaran digital di desa tidak dapat hanya mengandalkan sosialisasi atau edukasi pengguna. Intervensi struktural berupa pembangunan jaringan internet, penguatan sinyal di wilayah blank spot, penyediaan perangkat pendukung, serta perluasan jaringan agen dan merchant menjadi prasyarat utama. Tanpa upaya tersebut, transformasi menuju *cashless society* di pedesaan akan berjalan lambat dan tidak merata. Secara keseluruhan, dominannya pengaruh akses infrastruktur menegaskan bahwa digitalisasi sistem pembayaran di pedesaan merupakan proses yang kompleks dan memerlukan sinergi antara kebijakan publik, penyedia layanan keuangan, dan kesiapan masyarakat lokal. Temuan ini memberikan implikasi kebijakan penting bagi pemerintah daerah dan lembaga keuangan dalam merancang strategi inklusi keuangan digital yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Pengaruh Adopsi Pembayaran Digital Terhadap Perilaku Finansial

Hasil analisis menunjukkan bahwa adopsi pembayaran digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku finansial masyarakat Desa Pekalongan, dengan nilai koefisien sebesar 0.41 dan *p-value* 0.000. terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4 : Pengaruh Adopsi Pembayaran Digital Terhadap Prilaku Finansial

Hubungan	Koefisien	p-value	Kesimpulan
Adopsi → Perilaku Finansial	0.41	0.000	Signifikan

Sumber : Olah data primer peneliti 2025

Hasil analisis menunjukkan bahwa adopsi pembayaran digital berpengaruh positif

dan signifikan terhadap perilaku finansial masyarakat Desa Pekalongan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan frekuensi dan intensitas penggunaan pembayaran digital, seperti QRIS dan e-wallet, berkontribusi nyata terhadap terbentuknya perilaku keuangan yang lebih terstruktur dan rasional. Dalam perspektif *behavioral finance*, penggunaan pembayaran digital membantu mengurangi bias kognitif dalam pengelolaan keuangan, khususnya *mental accounting* dan *present bias*, karena transaksi tercatat secara otomatis dan dapat ditinjau kembali oleh pengguna. Riwayat transaksi digital memungkinkan individu untuk mengevaluasi pola pengeluaran secara lebih objektif dibandingkan transaksi tunai yang sulit dilacak.

Selain itu, dari sudut pandang teori *nudging*, fitur-fitur pembayaran digital seperti notifikasi transaksi, ringkasan pengeluaran, dan kemudahan akses informasi keuangan berfungsi sebagai *behavioral nudges* yang mendorong pengguna untuk lebih disiplin dalam mengelola keuangannya. Mekanisme ini secara tidak langsung meningkatkan kesadaran finansial dan mendorong pengendalian pengeluaran serta kebiasaan menabung. Dengan demikian, adopsi pembayaran digital tidak hanya berperan sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai instrumen perubahan perilaku finansial. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa transformasi sistem pembayaran di pedesaan dapat memberikan dampak substantif terhadap kualitas pengelolaan keuangan masyarakat, asalkan penggunaan teknologi dilakukan secara berkelanjutan dan didukung oleh literasi keuangan yang memadai. Pembayaran digital menyediakan fitur-fitur yang secara tidak langsung mendorong perubahan perilaku, seperti riwayat transaksi, notifikasi pengeluaran, dan pemisahan saldo, yang tidak ditemukan dalam transaksi tunai dengan uraian sebagai berikut :

1. Peningkatan pencatatan dan transparansi transaksi, Penggunaan pembayaran digital memungkinkan masyarakat untuk mengakses catatan transaksi secara otomatis dan real-time. Riwayat transaksi yang tersimpan dalam aplikasi *e-wallet* atau *mobile banking* membantu pengguna mengetahui pola pengeluaran harian maupun bulanan. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa responden mengaku mulai mengevaluasi pengeluaran mereka setelah melihat rekapan transaksi digital, sesuatu yang sebelumnya jarang dilakukan ketika menggunakan uang tunai. Hal ini menunjukkan bahwa pembayaran digital meningkatkan transparansi keuangan dan mempermudah praktik pencatatan, meskipun secara informal.
 2. Pengendalian pengeluaran lebih banyak, Pembayaran digital juga berperan dalam meningkatkan kontrol pengeluaran. Notifikasi transaksi yang muncul setiap kali pembayaran dilakukan membuat pengguna lebih sadar terhadap jumlah uang yang dikeluarkan. Kesadaran ini mengurangi perilaku konsumsi impulsif, karena setiap transaksi tercatat dan dapat ditinjau kembali. Temuan ini memperkuat argumen bahwa pembayaran digital menciptakan *psychological accountability*, di mana pengguna merasa lebih bertanggung jawab atas keputusan keuangannya.
 3. Peningkatan kemampuan dan disiplin menabung, Adopsi pembayaran digital juga berkorelasi positif dengan kemampuan menabung. Beberapa responden menggunakan *e-wallet* sebagai sarana menyimpan dana secara terpisah dari uang tunai, sehingga membantu memisahkan uang belanja dan uang simpanan. Selain itu, kemudahan transfer dan top-up mendorong praktik menabung dalam jumlah kecil
-

tetapi rutin. Hal ini menunjukkan bahwa pembayaran digital dapat menjadi alat inklusif yang memfasilitasi kebiasaan menabung, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses tabungan formal.

4. Perubahan pola pengelolaan keuangan rumah tangga, Secara keseluruhan, adopsi pembayaran digital mendorong masyarakat desa menuju pola pengelolaan keuangan yang lebih terencana. Meskipun belum sepenuhnya menggantikan uang tunai, penggunaan QRIS dan *e-wallet* mulai membentuk kebiasaan baru, seperti mengecek saldo sebelum bertransaksi dan mempertimbangkan pengeluaran berdasarkan sisa saldo. Perubahan ini menunjukkan bahwa teknologi pembayaran digital berperan sebagai *behavioral nudge* yang mengarahkan pengguna pada perilaku finansial yang lebih disiplin.
5. Implikasi kontekstual pedesaan, Namun demikian, dampak positif ini masih bersifat bertahap dan sangat bergantung pada intensitas penggunaan. Pada masyarakat yang menggunakan pembayaran digital secara sporadis, perubahan perilaku finansial belum terlalu signifikan. Sebaliknya, responden yang menggunakan pembayaran digital secara rutin menunjukkan tingkat kontrol dan pencatatan keuangan yang lebih baik. Hal ini menegaskan bahwa adopsi yang bersifat kebiasaan (*habitual use*) menjadi kunci dalam mendorong transformasi perilaku finansial di pedesaan

Kombinasi responden survei dan informan kunci dalam penelitian ini tidak hanya meningkatkan keandalan dan validitas data melalui triangulasi sumber, tetapi juga memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap mekanisme adopsi pembayaran digital di masyarakat desa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa adopsi pembayaran digital berkontribusi pada pembentukan perilaku finansial yang lebih terstruktur, seperti pencatatan transaksi, pengendalian pengeluaran, dan kebiasaan menabung. Hasil ini sejalan dengan penelitian Pratama yang menemukan bahwa penggunaan pembayaran digital dapat meningkatkan disiplin keuangan melalui kemudahan pelacakan transaksi. Namun, berbeda dengan studi Rahmawati dan Nugroho (Pratama A, 2024) yang berfokus pada konteks perkotaan dan UMKM terdigitalisasi, penelitian ini memperluas literatur dengan menunjukkan bahwa mekanisme serupa juga terjadi di wilayah pedesaan, meskipun dengan intensitas dan tantangan yang berbeda. Dari perspektif *behavioral finance*, fitur pembayaran digital seperti riwayat transaksi dan notifikasi berperan sebagai bentuk *nudging* yang mendorong individu untuk lebih sadar terhadap arus keuangannya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi temuan sebelumnya, tetapi juga memberikan kontribusi baru dengan menempatkan perilaku finansial masyarakat desa sebagai indikator keberhasilan transformasi digital, serta memperkaya pemahaman mengenai bagaimana adopsi teknologi keuangan dapat memengaruhi perubahan perilaku ekonomi di konteks pedesaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi adopsi pembayaran digital di masyarakat pedesaan serta pengaruh adopsi tersebut terhadap perilaku finansial, dengan studi kasus di Desa Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Fokus penelitian diarahkan pada peran kemudahan penggunaan, kemanfaatan, kepercayaan,

literasi digital, dan akses infrastruktur dalam mendorong penggunaan pembayaran digital, serta implikasinya terhadap perubahan perilaku keuangan masyarakat desa. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa adopsi pembayaran digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku finansial masyarakat desa, yang tercermin dari meningkatnya pencatatan transaksi, kontrol pengeluaran, serta kemampuan menabung. Semakin tinggi frekuensi penggunaan pembayaran digital, semakin baik perilaku keuangan yang ditunjukkan oleh responden. Hal ini mengindikasikan bahwa pembayaran digital tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga berperan sebagai instrumen pembentuk perilaku keuangan yang lebih terstruktur dan rasional. Dengan demikian, percepatan digitalisasi sistem pembayaran di pedesaan berpotensi meningkatkan inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat, asalkan didukung oleh perbaikan infrastruktur, peningkatan literasi digital, dan penguatan kepercayaan terhadap sistem keuangan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh faktor adopsi pembayaran digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penggunaan pembayaran digital di masyarakat desa, dengan akses infrastruktur sebagai faktor paling dominan. Selanjutnya, adopsi pembayaran digital terbukti memberikan pengaruh positif terhadap perilaku finansial masyarakat, khususnya dalam hal pencatatan transaksi, pengendalian pengeluaran, dan kebiasaan menabung. Temuan ini menegaskan bahwa pembayaran digital tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai instrumen pembentuk perilaku keuangan yang lebih terstruktur dan rasional di wilayah pedesaan. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, cakupan lokasi penelitian yang terbatas pada satu desa menyebabkan generalisasi temuan ke wilayah pedesaan lain perlu dilakukan dengan kehati-hatian. Kedua, pengukuran perilaku finansial masih bergantung pada persepsi responden melalui kuesioner, sehingga berpotensi mengandung bias subjektif. Ketiga, penelitian ini belum mengakomodasi faktor psikologis lain, seperti sikap terhadap risiko atau pengaruh norma sosial secara lebih mendalam, yang mungkin turut memengaruhi adopsi pembayaran digital. Berdasarkan temuan dan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan melibatkan lebih banyak desa dengan karakteristik sosial-ekonomi yang berbeda agar hasil penelitian lebih generalizable. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengintegrasikan pendekatan longitudinal untuk mengamati perubahan perilaku finansial dalam jangka panjang. Penambahan variabel psikologis dan sosial, seperti norma subjektif dan preferensi risiko, juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai mekanisme adopsi pembayaran digital di pedesaan. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini merekomendasikan penguatan infrastruktur digital, peningkatan literasi keuangan dan digital, serta penguatan peran agen layanan keuangan sebagai langkah strategis untuk mendorong inklusi keuangan yang berkelanjutan di wilayah pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Addy, P. (2024). Digital trust and mobile banking usage behavior. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 76.
- Alliance for Financial Inclusion. (2022). *Digital financial inclusion framework*. Diperoleh dari <https://www.afii-global.org/>
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2023). *Survei penetrasi dan perilaku internet masyarakat Indonesia tahun 2023*. Diperoleh dari <https://apjii.or.id/survei>
-

- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
- Hanifah, S. (2025). Determinan adopsi QRIS di wilayah pedesaan berbasis UTAUT. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 6(1), 31–46.
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica*, 47(2), 263–291.
- McKnight, D. H., Choudhury, V., & Kacmar, C. (2002). Developing and validating trust measures for e-commerce. *Information Systems Research*, 13(3), 334–359.
- Muchtar, R. (2024). Analisis penerimaan QRIS menggunakan Technology Acceptance Model. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 11(2), 145–158.
- Narula, S. (2023). Trust and mobile payment adoption in emerging economies. *Journal of Financial Services Marketing*, 28, 112–126.
- Paramita, E. D., & Cahyadi, E. R. (2024). The determinants of behavioral intention and use behavior of QRIS as digital payment method using extended UTAUT model. *Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship*, 10(1), 132.
<https://doi.org/10.17358/ijbe.10.1.132>
- Rahmawati, D., & Nugroho, A. (2023). Adopsi pembayaran digital dan implikasinya terhadap perilaku transaksi masyarakat perkotaan di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 25(2), 145–158.
- Ramayanti, D. (2025). Faktor yang memengaruhi minat penggunaan e-wallet di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 4(1), 22–35.
- Setiawan, B., & Yuliani, T. (2022). Hambatan inklusi keuangan digital di wilayah pedesaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 26(3), 487–501.
- Shefrin, H. (2020). *Beyond greed and fear: Understanding behavioral finance*. Boston, MA: Harvard Business School Press.
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly*, 27(3), 425–478.
-